

BAB II

TALAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka Dan Hipotesis

1) Pengertian Akuntansi

Lembaga pemerintah memang lebih terkesan sebagai politik, akan tetapi didalam lembaga itu tetap memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi disatu sisi sebagai lembaga pemerintahan melakukan bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan disisi lain lembaga ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi biaya tersebut.

Berdasarkan aktivitas ekonominya, tidak dapat dihindari bila lembaga pemerintah juga membutuhkan jasa akuntansi, baik untuk meningkatkan mutu pengawasan maupun untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

Akuntansi Keuangan Daerah merupakan suatu hal yang baru dalam akuntansi pemerintah. Akuntansi Keuangan Daerah adalah salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapatkan perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari Pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Kerangka konseptual akuntansi adalah Konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah dan merupakan acuan bagi komite standar akuntansi pemerintahan, penyusunan laporan keuangan dalam memecah atas suatu masalah

yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruall dan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akruall.

Pemerintah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akruall, yaitu standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, hutang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruall, serta mengakui pendapatan belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan. Standar akuntansi pemerintah tersebut dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintah dan dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah.

Akuntansi ditinjau dari perkembangannya selalu mengalami peningkatan baik sistem maupun aspek kinerja akuntansi itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya penggunaan sistem akuntansi yang sesuai dan dapat diterima umum dalam pelaksanaan pembangunan dan perekonomian negara khususnya tercermin dari pengelolaan keuangan pemerintahan. Berkenaan dengan hal tersebut maka bab ini akan membahas mengenai akuntansi keuangan daerah, dan penerapan akuntansi keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

1. Pengertian Akuntansi

Ekonomi oleh Charles T. Horngren, dan Walter T. Harrison (Horngren Harrison, 2007:4) Pengertian Akuntansi ialah suatu sistem informasi yang mampu mengukur kegiatan bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan (manager).

Pengertian akuntansi menurut Warren dkk (2005 : 10) menyebutkan kalau: “secara umum : akuntansi bias didefinisikan jadi system info yang dihasilkan laporan pada pihak-pihak yang mempunyai urasan tentang kesibukan ekonomi serta keadaan perusahaan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa informasi akuntansi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dengan cara mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan.

Bidang akuntansi secara keseluruhan dapat dikelompokkan kedalam tiga bagian yaitu :

1) Akuntansi pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga yang tidak bertujuan mencari laba (digolongkan sebagai akuntansi mikro).

2) Akuntansi nasional

Akuntansi nasional adalah akuntansi sosial atau biasa disebut akuntansi makro adalah akuntansi yang khusus ditetapkan oleh lembaga dalam arti makro akuntansi.

3) Akuntansi perusahaan

Akuntansi perusahaan disebut juga akuntansi yang komersial adalah bidang akuntansi yang bertujuan mencari laba (*profit oriented*) secara rinci akuntansi perusahaan dapat dibedakan menjadi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen lebih ditujukan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi pengelola perusahaan.

2. **Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah**

Keuangan daerah merupakan segala sesuatu yang baik berupa uang maupun barang yang dapat di jadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Abdul Halim (2012: 25), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku.

Sumber penerimaan terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak, sumbangan dan bantuan serta penerimaan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada terciptanya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kebersamaan berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dengan meningkatkan kemakmuran rakyat yang merata.

Prinsipnya pengertian keuangan negara sama dengan keuangan daerah, perbedaan antara keuangan negara dengan keuangan daerah adalah keuangan negara meliputi semua aspek kekayaan negara, sedangkan keuangan daerah hanya

meliputi pengelolaan keuangan suatu daerah tertentu saja. Pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan perencanaan dari anggaran daerah.

Abdul Halim (dalam Sefni Kasmita 2003: 14) mengemukakan bahwa akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintahan daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam rangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dari beberapa defenisi diatas terdapat dua hal yang perlu dijelaskan yaitu :

- 1) Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain. Dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah.
- 2) Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam

rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Menurut Deddi Nordiawan, (2006:5) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dapat di definisikan sebagai berikut : “Serangkaian prosedur yang saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan skema menyeluruh yang ditunjukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.”

3. Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah

Tujuan akuntansi keuangan daerah, American Accounting Association dalam Glynn menyatakan bahwa tujuan akuntansi keuangan daerah yaitu :

- a) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercaya kepada organisasi.
- b) Menurut PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi standar akuntansi keuangan.(2004:4).
- c) Memberi informasi yang memungkinkan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai

pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas operasi pemerintah dan menggunakan dana publik

Dari hasil penyelaan di atas pada dasarnya akuntansi keuangan baik perusahaan maupun pemerintah adalah sama, hanya saja akuntansi untuk pemerintahan dikelompokkan sebagai akuntansi yang berdiri sendiri terpisah dari akuntansi perusahaan.

4. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah

a) Sistem Pencatatan

Menurut Abdul Halim (2012: 44), Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi. Yang dimaksud pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan yang mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak. Pada dasarnya ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan uang. Jadi, semua transaksi didalam akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang. Proses berikutnya adalah pencatatan ekonomi, yaitu pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan atau pengurangan atas sumber daya yang ada. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi.

Dalam buku Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012: 45-51) Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu :

1. *Single entry*

Sistem pencatatan *single entry* sering juga disebut dengan sistem pencatatan tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

2. *Double entry*

Sistem pencatatan *double entry* juga sering disebut dengan tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini ada sisi debit dan kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi tersebut berbentuk sebagai berikut :

$$\text{ASET} + \text{BEBAN} = \text{UTANG} + \text{EKUITAS} + \text{PENDAPATAN}$$

3. *Triple entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, sub bagian pembukuan (bagi keuangan) pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan efektif pada sisi anggaran.

b) Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah

Pengakuan adalah kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan transaksi dicatat digunakan berbagai sistem/ basis/ dasar akuntansi.

Dalam buku Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:5-55) dasar akuntansi terbagi empat yaitu :

1) Basis kas (*cash basis*)

Basis kas, seperti telah diuraikan sebelumnya menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, apabila suatu transaksi bukan menimbulkan perubahan kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.

2) Basis akrual (*accrual basis*)

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa itu terjadi dan bukan hanya saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam pelaporan keuangan pada periode terjadinya.

3) Basis kas modifikasian (*modified cash basis*)

Basis kas modifikasian mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4) Basis akrual modifikasian (*modified accrual basis*)

Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebahagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan.

5. Tujuan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah :

- a) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik serta sebagian bukti pertanggung jawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
- b) Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Menurut Abdul Halim (2004:26) tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah adalah :

- a) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah daerah.
- b) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.
- c) Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
- d) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.
- e) Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

6. **Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi terdiri dari tiga bidang utama, yakni Akuntansi komersial/perusahaan, Akuntansi Pemerintah, dan Akuntansi sosial. Dalam akuntansi komersial, data digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanam modal, kreditor, dan pihak - pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Dalam akuntansi pemerintahan, data digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat. Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro, yang melayani perekonomian nasional. Sebagai contoh adalah neraca pembayaran Negara, transaksi arus dana, transaksi pendapatan dan produksi nasional, serta neraca nasional.

Lingkup Akuntansi Pemerintahan adalah :

- 1) Akuntansi Pemerintah Pusat
- 2) Akuntansi Pemerintah Daerah, terdiri atas :
 - (a) Akuntansi Pemerintah Provinsi
 - (b) Akuntansi Pemerintah Kabupaten/Kota

7. Lingkungan Akuntansi keuangan daerah

Abdul Halim (dalam Tika Sukma Anugrah 2013:19) mengemukakan bahwa Seluruh informasi dan data-data yang disusun dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan digunakan oleh berbagai pihak *eksternal*, yaitu pihak- pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan

terhadap pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung biasanya disebut sebagai Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi :

a) DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah.

b) BPK (Badan Pengawas Keuangan)

BPK adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

c) Investor, Kreditur, dan Donatur

Badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.

d) Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah

Pihak- pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah, seperti : lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi beserta akademisnya), ilmuwan, peneliti, konsultan, LSM, dan lain-lain.

e) Rakyat

Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk atau jasa pemerintah daerah.

f) Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggung jawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah.

g) Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten atau Kota)

Pemerintah daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman.

8. Perbedaan Akuntansi Keuangan Daerah dengan Akuntansi Perusahaan

- 1) Akuntansi keuangan daerah direncanakan , diorganisasikan, dan dioperasikan atas dasar dana, tetapi terpisah dalam kesatuan macam-macam dana, sedangkan akuntansi perusahaan merupakan kesatuan usaha yang utuh.
- 2) Akuntansi Keuangan Daerah lebih mengutamakan ketentuan hukum, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan akuntansi perusahaan lebih mengutamakan prinsip yang berterima umum.
- 3) Adanya perbedaan mendasar terhadap tujuan anggaran pemerintah dengan perusahaan, pemerintah tidak berorientasi pada laba tetapi lebih memenuhi kebutuhan atau kepentingan umum, sedangkan perusahaan bertujuan mencari laba.

9. Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Dasarnya siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti siklus akuntansi, Yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah tahap-tahap yang ada dalam siklus akuntansi.

Adapun tahapan-tahapan siklus akuntansi yaitu :

1) Transaksi

Transaksi merupakan kegiatan yang mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data atau dokumen atau bukti pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas.

2) Bukti transaksi

Transaksi yang terjadi pertama-tama akan direkam dalam formulir sehingga formulir tersebut merupakan bukti. Formulir-formulir ini dibagi menjadi formulir internal yaitu formulir yang dibuat oleh organisasi yang bersangkutan dan formulir-formulir yang diterima dari luar organisasi.

3) Jurnal

Jurnal merupakan media/metode yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis (urut waktu). Jurnal disebut juga sebagai buku harian karena fungsi jurnal digunakan untuk melakukan pencatatan pertama dari transaksi-transaksi. Dalam jurnal transaksi keuangan diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

4) Posting ke buku besar

Setelah dilakukan jurnal kemudian jumlah yang terdapat pada sisi debit dan sisi kredit dipindahkan/ditransfer ke rekening buku besar yang sesuai. Tindakan ini disebut posting

Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan rekening. Bertujuan mencatat secara terpisah atas pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, hutang dan ekuitas dana.

5) Buku besar pembantu

Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat rincian rekening tertentu yang ada di buku besar. Rekening buku besar yang rinciannya dicatat dalam buku pembantu disebut rekening pengawas, sedangkan rekening yang merinci rekening pengawas disebut rekening pembantu. Contoh buku pembantu adalah buku pembantu piutang, buku pembantu persediaan dan sebagainya.

6) Neraca saldo

Neraca merupakan daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya pada suatu periode tertentu.

7) Jurnal penyesuaian

Pendapatan dan biaya harus diakui pada periode akuntansi tertentu. Pendapatan dianggap telah diperoleh kalau jasa itu telah diserahkan kepada konsumen, meskipun kasnya belum diterima. Sebaliknya, jika kas telah diterima sebelum jasa diserahkan kepada konsumen, maka penerimaan kas tidak boleh diakui sebagai pendapatan periode sekarang. Dalam kasus ini, penerimaan uang muka dari pelanggan dilaporkan sebagai utang.

Jurnal penyesuaian dibuat untuk tujuan berikut :

- a) Melaporkan semua pendapatan yang diperoleh selama periode akuntansi.
- b) Melaporkan semua biaya yang terjadi selama periode akuntansi.

- c) Melaporkan dengan akurat nilai aktiva pada tanggal neraca, sebagian nilai aktiva pada awal periode telah terpakai selama satu periode akuntansi yang dilaporkan.
 - d) Melaporkan secara akurat kewajiban (hutang) pada tanggal neraca.
- 8) Neraca saldo setelah penyesuaian

Setelah jurnal penyesuaian dibuat, langkah berikutnya adalah mempostingnya ke rekening buku besar yang berhubungan. Setelah dilakukan posting prosedur akuntansi berikutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian.

Neraca saldo setelah penyesuaian adalah neraca saldo yang disusun setelah pembuatan jurnal-jurnal penyesuaian. Saldo-saldo rekening yang ada dalam neraca saldo setelah penyesuaian adalah saldo rekening setelah disesuaikan. Apabila dalam jurnal penyesuaian muncul rekening baru, maka rekening baru ini juga dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Dengan adanya jurnal penutup, rekening yang tetap ada adalah rekening permanen yaitu aset, hutang dan ekuitas dana.

Untuk menihilkan rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan digunakan rumus sebagai berikut :

- a) Karena pendapatan terletak pada sisi kredit maka untuk menihilkannya harus didebit, demikian halnya penerimaan pembiayaan.
- b) Karena belanja terletak pada sisi debit maka untuk menihilkannya harus dikredit, demikian halnya pengeluaran pembiayaan.

- c) Karena APBD kita menganut surplus dan defisit maka posisi silpa kemungkinan debit dan kemungkinan kredit.

Berdasarkan rumus tersebut jurnal penutup yang dibuat sebagai berikut:

Pendapatan	xxx	
Penerimaan pembiayaan	xxx	
Silpa	xxx	
Belanja		xxx
Pengeluaran pembiayaan		xxx
Silpa		xxx

9) Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri dari :

(a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber data ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam suatu periode.

(b) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Unsur-unsur yang dicakup oleh laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke kas daerah.
- b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari kas daerah.

(1) Neraca

Neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran utuh suatu entitas pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Dalam neraca akan tergambar posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2002:6), “Neraca adalah posisi keuangan yang menggambarkan posisi keuangan dalam suatu tanggal tertentu atau *a moment of time*”.

(2) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.

(3) Neraca Saldo Setelah Penutupan.

Tahap akhir dari siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo penutupan berisi saldo rekening-rekening setelah jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat karena pada dasarnya rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan merupakan sub-bagian dari rekening ekuitas dana,

sehingga pada akhir periode akuntansi atau akhir tahun anggaran saldo- saldonya akan ditransfer ke rekening ekuitas.

Rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan disebut rekening temporer (nominal) sedangkan rekening aset, hutang dan ekuitas dana disebut rekening permanen (real). karena saldo rekening temporer dalam hal ini pendapatan, belanja dan pembiayaan tidak berlanjut pada tahun berikutnya maka angka-angka rekening tersebut harus dinihilkan melalui jurnal penutup.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

Tentang Standar Akuntansi Pemerintah tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan. Untuk umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005

Tentang Pengelolaan bertanggungjawab keuangan daerah pada dasarnya yang melatar belakangi terbitnya peraturan perundang-undangan ini adalah keinginan untuk mengelolah keuangan Negara dan daerah secara efektif dan efisien, ide dasar tersebut tentunya ingin di laksanakan melalui data kelola

pemerintah yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan pertifatif.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3) sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Didalam pasal 232 ayat (6) disebutkan bahwa dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi :

- 1) Laporan realisasi anggaran
- 2) Neraca
- 3) Catatan atas laporan keuangan

Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, Yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas dan prosedur akuntansi selain aset.

- a) Prosedur akuntansi penerimaan kas

Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan/ atau kejadian keuangan serta pelaporan

keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD dan atau SKPKD.

b) Prosedur akuntansi pengeluaran kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan/ atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksana APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/ atau SKPKD.

c) Prosedur akuntansi selain kas

Prosedur akuntansi selain kas adalah meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian selain kas pada SKPD atau SKPKD.

d) Prosedur akuntansi aset

Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai digunakan SKPD atau SKPKD.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Akuntansi proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklarifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

Kerangka konseptual akuntansi pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah dan merupakan acuan bagi komite akuntansi pemerintah, penyusunan laporan keuangan dalam pemecah atas suatu masalah yang belum diatur dalam persyaratan standar akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi pajak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 merupakan peraturan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Standar ini digunakan untuk pengambilan keputusan, kebijakan akuntansi dan rujukan dalam proses pembuatan laporan keuangan berbasis akrual.

B. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengemukakan hipotesis yaitu Diduga Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

